

Semol-91-001

4. REPELIT 70/1

ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA

01-91
Semol-91-
001



**PEMBANGUNAN BIDANG SOSIO BUDAYA
DALAM ERA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG II**



Oleh :

**SOEPARDJO ROESTAM
MENKO KESRA**

**SEMINAR POLRI 1991
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
Jakarta, 25 s/d 27 April 1991**



PERPUSTAKAAN	
PERGURUAN TINGGI ILMU NEPO-ICIAN	
BUKU2	PEMBELIAN / SUMBO / HADIAH
DARI	<i>Simo - ke bang pake!</i>
TANGGAL TERIMA :	<i>28-9-92</i>
No. INDUK :	<i>349/000 buku</i>

**PEMBANGUNAN BIDANG SOSIO BUDAYA
DALAM ERA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG II**

**Soepardjo Roestam
Menko Kesra**

Telah menjadi kesepakatan kita bersama bahwa di dalam Pembangunan Jangka Panjang II (PJP II) yang akan datang nanti sasaran utama yang hendak kita tuju adalah meningkatkan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia. Sasaran seperti itu tentu-lah merupakan kelanjutan dari Pembangunan Nasional Jangka Panjang Pertama (PJP I). Apabila dalam PJP I sasaran utama yang kita tuju adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia, maka PJP II lebih lanjut memusatkan kepada upaya meningkatkan kualitas manusia dan kualitas masyarakat sebagai penerima, pemakai dan pengembang landasan yang sudah diwujudkan oleh PJP I tadi.

Landasan yang kuat tersebut adalah konsensus-nasional mengenai sistem nasional, yaitu sistem demokrasi Pancasila, baik yang berkenaan dengan dasar-dasar konseptual maupun yang menyangkut pola-pola fungsional-strukturalnya. Dengan bekal landasan seperti itulah bangsa Indonesia melanjutkan perjalanannya.

Pendekatan Sosio-Kultural Di dalam Pembangunan

Konsensus mengenai sasaran utama PJP II tersebut juga mengungkapkan bahwa pembangunan nasional itu akan dilaksanakan dengan pendekatan sosio kultural. Hal ini sebetulnya telah pula ditegaskan di dalam PJP I, dimana telah disepakat bahwa pembangunan nasional pengamalan Pancasila dan karena itu maka hakikat pemba -

ngunan nasional kita adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Kita menempatkan manusia dan masyarakat menjadi perhatian utama di dalam konsep pembangunan nasional, dan dengan cara demikian ini berarti menempatkan pembangunan di dalam latar sosio kultural.

Dengan demikian semakin jelas pula bahwa pembangunan nasional itu tidak lain adalah aktualisasi dari ideologi nasional kita, yaitu Pancasila, yang memang juga merupakan dasar negara dan sekaligus juga nilai-nilai dasar di dalam pandangan hidup bangsa kita.

Hal itu semua berarti bahwa pembangunan tersebut akan selalu dan harus ditujukan kepada usaha menciptakan kondisi yang memberikan kemungkinan bagi manusia dan masyarakat Indonesia untuk sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya berlangsung proses aktualisasi dirinya. Sistem politik, sistem ekonomi maupun sistem tata kemasyarakatan haruslah merupakan sistem yang memberikan peluang bagi sebesar-besar dan setinggi-tingginya proses aktualisasi diri bangsa Indonesia. Gelar aktualisasi diri ini tidak lain adalah gelar kehidupan sosio kultural bangsa Indonesia, yang terwujud di dalam sistem demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan tata kemasyarakatan berdasarkan atas Pancasila.

Dengan perkataan lain bidang sosio kultural yang muatannya adalah kualitas gelar aktualisasi diri manusia dan masyarakat Indonesia tersebut, merupakan sumber dan sekaligus muara dari gerak pembangunan nasional yang kita laksanakan.

Prioritas Pembangunan Di Dalam PJP II

Kualitas manusia dan masyarakat Indonesia sebagai proses aktualisasi diri bangsa Indonesia di dalam mencapai cita-cita nasional

akan selalu dibentuk dan dipengaruhi oleh kondisi internalnya di satu pihak dan kemampuannya menjawab tantangan-tantangan kondisi eksternalnya di lain pihak.

Di dalam hal kondisi eksternal ini perlu kita perhatikan bahwa PJP I ternyata telah membuat kehidupan bangsa, masyarakat dan negara kita menjadi makin struktural terkait dengan perkembangan internasional. Perkembangan ini akan makin mewarnai dan makin melekat di dalam perjalanan bangsa kita di dalam PJP II. Medan internasional dan medan global akan makin menjadi medan aktualisasi diri bangsa kita. Gelar sosio kultural akan makin berinteraksi dengan arus gelombang internasional, arus gelombang global.

Dari perkembangan internasional dan perkembangan global dewasa ini dapatlah kita angkat adanya petunjuk bahwa kualitas kekuatan suatu bangsa, suatu negara dan suatu masyarakat, akan makin ditentukan oleh kualitas sistem ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu dan teknologi. Gelombang sejarah di masa yang akan datang akan berjalan di dalam era kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu dan kekuatan teknologi.

Dengan mempertimbangkan kenyataan ini maka di dalam PJP II yang akan datang nanti, bangsa kita tetap perlu membuat pembangunan ekonomi yang terkait dengan pembangunan ilmu dan teknologi menjadi titik berat pembangunan nasional. Kualitas manusia dan kualitas masyarakat kita akan banyak ditentukan oleh kualitas kekuatan sistem ekonomi nasional kita dan kualitas penguasaan ilmu dan teknologi yang menyertainya. Dengan berbekal landasan pembangunan nasional dan kemudian ditambah dengan terwujudnya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia seperti itulah bangsa kita akan dapat tumbuh dan berkembang atas dasar kekuatannya sendiri di dalam interaksinya dengan gelombang internasional dan arus global yang

menjadi makin kompleks, makin saling terkait, makin cepat gerak dan fluktuasinya.

Dengan demikian maka dalam hal titi berat pembangunan ini kitapun tetap melaksanakan prinsip kontinuitas antara PJP I dan PJP II. Namun di dalam kontinuitas ini akan terjadilah suatu proses transformasi kualitatif yang membedakan PJP II dari PJP I karena terjadinya peningkatan di dalamnya.

Pada era PJP I, di dalam pembangunan ekonomi usaha kita ditujukan kepada upaya menyeimbangkan struktur ekonomi agraris dan struktur ekonomi industri. Pada PJP II, dengan telah tercapainya titik keseimbangan tersebut, akan terjadilah proses transformasi kepada manunggalnya struktur ekonomi modern yang basisnya industri. Dengan perkataan lain, di dalam PJP II itulah kita akan mengawali membangun masyarakat Indonesia tumbuh berkembang sebagai masyarakat industri. Pertanian yang merupakan lahan dasarnya masyarakat Indonesia juga akan mengalami transformasi menjadi industri pertanian.

Dimensi Sosio Kultural Dari Masyarakat Industri

Pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan di dalam memasuki PJP II sebagai awal dari tumbuhnya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju sebagai masyarakat industri itu adalah "what kind of industrial society do we want to create" masyarakat industri yang bagaimanakah yang ingin kita wujudkan. Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengaitkannya kembali dengan sasaran utama yang telah kita konsensuskan menjadi sasaran utama PJP II yang akan datang, yaitu membangun kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia. Maka itu masyarakat industri yang kita bangun haruslah masyarakat industri yang secara inheren dituju-

kan kepada upaya membangun kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam TAP MPR 1988 Tentang GBHN.

Semua itu juga berarti bahwa masyarakat industri yang ingin kita wujudkan itu adalah masyarakat industri yang berdimensi sosio-kultural. Artinya: manusia dan masyarakat Indonesia dari satu pihak adalah sumber bagi terjadinya masyarakat industri itu; dari lain pihak manusia dan masyarakat Indonesia adalah tujuan ke mana masyarakat industri itu harus bermuara. Dimensi sosio-kultural merupakan dimensi yang harus dipertimbangkan di dalam membangun Indonesia menjadi masyarakat industri baik sebagai proses maupun sebagai produk.

Sesungguhnya hal itu tidak lain daripada amanat Pembukaan Konstitusi yang harus diperhatikan dan diimplementasikan, ialah: mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pencerdasan kehidupan bangsa adalah dimensi kulturalnya, sementara kesejahteraan umum merupakan dimensi sosio kemasyarakatannya. Masyarakat industri yang kita bangun haruslah masyarakat industri yang terkait dengan tugas membangun kualitas kecerdasan bangsa dan kualitas kesejahteraan umum itu.

Dengan demikian walaupun pembangunan ekonomi tetap kita jadikan prioritas ataupun titik berat di dalam PJP II, namun perlu sekali diupayakan adanya keterkaitan fungsional maupun struktural dengan usaha membangun kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia, dalam arti meningkatkan kualitas kecerdasan dan kualitas kesejahteraan.

Pasal 32 UUD 1945

Dalam kaitannya dengan usaha mewujudkan masyarakat industri

di dalam konteks pendekatan sosio-kultural itulah, maka apa yang diamanatkan oleh Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 mungkin perlu kita perhatikan. Dengan mengacu kepada penjelasan tersebut dapatlah dikemukakan beberapa pemikiran:

- bahwa tumbuhnya Indonesia menjadi masyarakat industri itu haruslah merupakan buah usaha dari seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa masyarakat industri baik sebagai proses maupun sebagai produk harus ditempatkan di dalam kerangka demokrasi ekonomi kita.
- bahwa membangun Indonesia menjadi masyarakat industri haruslah memperhatikan pluralisme kemasyarakatan, baik pluralisme fungsional, pluralisme sosiologikal maupun pluralisme teritorial dan lingkungan.
- bahwa tumbuhnya Indonesia menjadi masyarakat industri itu haruslah ditujukan kepada kemajuan peradaban, kebudayaan, persatuan serta kepada upaya mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.
- untuk membangun masyarakat industri kita harus berinteraksi dengan pihak-pihak luar. Kita tidak menolak bahan-bahan dari luar sejauh itu memajukan persatuan, peradaban, kebudayaan serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Masalah-masalah Yang Akan Timbul

Apabila kita akan berjalan dalam arah seperti itu, maka PJP II kiranya akan membawa serta berbagai gelombang permasalahan yang perlu kita perhatikan. Masalah yang paling dominan adalah masalah yang timbul dari terjadinya proses awal menuju kepada terwujudnya

masyarakat industri. Dengan perkataan lain, ekonomi akan menjadi faktor pemicu bagi berbagai permasalahan, yang akan mempunyai dampak terhadap bidang politik, dan juga terhadap bidang sosio-budaya.

Peradaban ekonomi modern akan makin menjadi peradaban masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa perangkat-perangkat ekonomi teknis, seperti uang, mekanisme pasar, harga, akan makin menjadi perangkat peradaban masyarakat Indonesia. Kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia akan makin ditentukan dan makin tergantung kepada sistem uang. Peradaban ekonomi tradisional agraris yang intinya adalah ditematkannya rasa aman pada basis tanah dan basis hubungan antar manusia akan hilang dan makin digantikan dengan sistem keuangan, mekanisme pasar, yang memerlukan perhitungan dan pertimbangan lain sama sekali. Proses ini akan menyentuh transformasi tata nilai maupun transformasi pranata institusional. Bidang sosio kultural akan menjadi medan terjadinya perubahan seperti itu. Sistem tradisional yang selama ini memberikan rasa aman terpaksa harus digantikan dengan sistem baru dengan tata nilai baru dan perangkat institusi baru, dengan model interaksi sosial yang baru pula.

Bila hal ini tidak dipersiapkan secara baik, maka medan sosio kultural akan menjadi medan yang penuh dengan potensi gejolak. Perubahan akan selalu membawa ketidak pastian dan ketidak siapan. Perubahan juga akan selalu mengakibatkan keharusan beradaptasi dengan peradaban baru. Semua ini berarti perlunya kita mengadakan langkah "to prepare the unprepared society", menyiapkan manusia dan masyarakat yang belum siap menjadi manusia dan masyarakat yang siap untuk berubah untuk maju. Dengan demikian bidang sosio-kultural akan merupakan bidang yang meminta perhatian yang besar, sebagai bidang penyangga proses transformasi ke arah gerak yang lebih maju itu.

Tata Nilai dan Institusi

Perubahan-perubahan yang harus terjadi di dalam era PJP II akan membawa implikasi bagi terjadinya perubahan tata nilai dan perubahan institusi. Perubahan tata nilai mencerminkan dimensi kultural, perubahan institusi mencerminkan dimensi struktural-fungsional masyarakat.

Andaikata saja kita tidak berpegang kepada Pancasila, tidak mustahil PJP II akan membawa serta gelombang yang mengharuskan bangsa Indonesia mengadakan perombakan nilai-nilai yang sifatnya mendasar fundamental, sebagaimana dialami oleh berbagai bangsa, negara dan masyarakat di seantero dunia. Karena Pancasila telah memuat nilai-nilai dasar kemanusiaan, maka dalam hal yang fundamental ini kita tidak terkena dampak gelombangnya perubahan di masa mendatang tersebut.

Perubahan tata nilai akan terjadi pada tingkat dan tataran aktualisasi. Inilah yang lazim dikemukakan sebagai nilai-nilai instrumental. Masyarakat industri yang cenderung kepada massifikasi, efektifitas, efisiensi, penguasaan pasar, dan menciptakan ketergantungan masyarakat, akan membawa serta berbagai nilai yang mungkin lebih bersifat stereotipe, kaku dan tidak mengenal kompromi dan toleransi. Demikian pula halnya dengan teknologi. Semua itu akan cenderung membuat manusia berjalan di dalam tata nilai yang bersifat satu dimensional. Hal seperti ini telah membawa masalah dan akan tetap membawa masalah.

Perkembangan seperti itu akan amat dipacu oleh berlakunya peradaban ekonomi modern yang intinya adalah sistem uang. Interaksi dan komunikasi sosio-kultural akan selalu membawa dan berimplikasi aspek uang, yang karena sifat rasionalnya akan membuat manusia

selalu harus tawar menawar baik dengan dirinya sendiri maupun dengan sesamanya.

Proses pertumbuhan tata nilai baru tersebut perlu didukung dengan pranata-pranata baru, terutama agar perubahan yang terjadi tidak mengakibatkan gejolak. Kuatnya uang sebagai peradaban ekonomi modern tentunya meminta terbukanya akses yang lapang bagi manusia dan masyarakat kepada sumber uang tersebut. Lapangan kerja dan financial institution akan menjadi institusi-institusi yang memerlukan pemikiran mendasar karena akan menjadi makin penting.

Bidang Sosio Budaya Sebagai Sumber Pendukung Pembangunan

Memandang bidang sosio budaya sebagai pendukung pembangunan berarti adanya tugas bahwa masyarakat harus disiapkan untuk menjadi pelaku di dalam perubahan-perubahan di dalam PJP II tersebut. Kualitas manusia dan kualitas masyarakat harus dipersiapkan, baik dari segi fisik, segi non fisik maupun dari segi institusionalnya. Hal ini tidaklah lain daripada usaha pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya, penerangan dalam arti yang sedalam-dalamnya dan selebar-lebarnya. Melalui proses ini kita membangun kesiapan dari "the unprepared society" menjadi "prepared society". Kita berusaha agar masyarakat industri potensial tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat industri real. Di samping pendidikan formal, maka pendidikan non formal perlu sekali menjadi bagian dari pembangunan bidang sosio-kultural ini. Bahkan juga pendidikan informal, dalam arti pendidikan keluarga. Keluarga-keluarga terutama dari lapisan yang paling lemah memerlukan bantuan besar untuk menjadi siap mengarungi perubahan-perubahan yang akan terjadi dan perlu terjadi. Penerangan juga menjadi makin penting karena masyarakat memerlukan pendampingan di dalam mengarungi perubahan-perubahan di masa yang akan datang nanti.

Bidang Sosio Budaya Sebagai Muara

Melihat bidang sosio budaya sebagai muara dari proses perubahan berarti melihat adanya keharusan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan. Hal ini sebetulnya juga amat erat kaitannya dengan pendidikan sebagaimana telah dikemukakan di atas. Kesejahteraan akan mempunyai pengaruh bagi terjadinya proses peningkatan kualitas kecerdasan. Sementara kualitas kecerdasan akan memungkinkan manusia dan masyarakat mencari peluang secara kreatif untuk membangun kesejahteraannya.

Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam PJP II dapat memperbesar terjadinya kesenjangan sosial. Masalah keadilan sosial akan makin tampil ke depan. Itulah sebabnya maka landasan sistem ekonomi nasional yang kuat harus menjadi makin mewujudkan. Demokrasi ekonomi merupakan infra struktur yang penting apabila kita berkeinginan membangun Indonesia menjadi masyarakat industri sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, tidak hanya di dalam konsep dan prinsip-prinsip dasar yang bagus, akan tetapi juga di dalam pranata fungsional dan strukturalnya yang harus efektif. Ekonomi teknis secara struktural harus selalu terkait dengan ekonomi sosial. Dalam pengertian ini kita harus membangun pertumbuhan dan modernisasi serta kemajuan yang tetap memiliki ketahanan nasional.

Penutup

Landasan sistem nasional yang kuat (PJP I) ditambah dengan kualitas kecerdasan dan kualitas kesejahteraan di dalam masyarakat Indonesia sebagai sebuah masyarakat industri memang akan merupakan paduan yang penting yang dapat mengantar bangsa kita tumbuh dan berkembang atas dasar kekuatannya sendiri, dan melaksanakan tugas aktualisasi dirinya di dalam medan internasional: duduk sama

rendah berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa, negara-negara dan masyarakat lain di dunia ini, secara terhormat. Dalam kerangka pikir seperti ini mungkin kita dapat mengatakan betapa PJP I dengan PJP II itu akan dapat mengantar perjalanan bangsa Indonesia memasuki PJP III: yaitu bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai peranan dan posisi kuat di dalam perkembangan global di masa yang akan datang nanti.

Sistem nasional yang kuat yang didukung dan dikelola oleh manusia dan masyarakat Indonesia yang memiliki kualitas kecerdasan dan kualitas kesejahteraan yang tinggi itulah yang akan menghantarkan bangsa dan negara kita kepada peran dan posisi seperti tersebut di atas di masa mendatang. Bahkan semua itu rasanya akan bergerak dengan lebih cepat. Keberhasilan pembangunan bidang sosio-budaya di dalam era PJP II tersebut akan menentukan apakah kita akan dapat mengakselerasikan terjadinya suasana PJP III tersebut di dalam kurun waktu PJP II yang akan datang ini nanti. Kegagalan di dalam pembangunan bidang sosio budaya akan berarti kegagalan kita membangun kekuatan bangsa kita, karena hal ini berarti kegagalan kita di dalam meningkatkan kualitas kecerdasan dan kesejahteraan. Kualitas kecerdasan dan kualitas kesejahteraan adalah wujud nyata dari pembangunan bidang sosio budaya, yang menjadi basisnya pertumbuhan demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi tata kemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan basisnya perjuangan kita mewujudkan cita-cita demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi tata kemasyarakatan di tingkat internasional.

dan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi yang meliputi perubahan struktur, proses, dan budaya organisasi. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai langkah strategis, seperti penghapusan jabatan yang berlebihan, penghapusan jabatan yang tidak produktif, dan penghapusan jabatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah

penghapusan jabatan yang berlebihan.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban kerja

pegawai yang ada dan meningkatkan produktivitas

pegawai yang ada.

Langkah lain yang perlu dilakukan adalah

penghapusan jabatan yang tidak produktif.

Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya

manusia yang ada dan meningkatkan efisiensi

organisasi.

Langkah lain yang perlu dilakukan adalah

penghapusan jabatan yang tidak sesuai dengan

kebutuhan organisasi.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa

struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan

organisasi dan meningkatkan efisiensi

organisasi.

